

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “Ordo” yang berarti deretan, susunan, kelas, aturan, atau ketertiban. Oleh karena itu, pengertian orde dapat diartikan sebagai suatu bagian/anggota yang memiliki banyak unsur yang diatur melalui prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengatur bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesatuan yang tersusun baik.

Orde lama adalah sebuah sebutan yang ditujukan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Soekarno memerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1945-1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Salah satu tokoh yang berperan adalah Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), Buya Hamka memiliki peran dalam kehidupan di Indonesia, mulai dari aspek politik, sastra hingga agama. Buya Hamka banyak berperan dalam aspek Agama Islam di Indonesia.

Beliau telah mengubah paradigma agama Islam yang awalnya hanya seperti agama yang yang dianut oleh masyarakat menengah ke bawah saat zaman kolonial menjadi agama yang semakin diterima dan dianut dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat menengah ke atas saat Indonesia merdeka. Selain itu, beliau juga mengubah figur ulama menjadi figur yang dapat menimbulkan rasa hormat dan respek. Pada bidang pendidikan Buya Hamka juga memiliki peranan karena Buya Hamka juga merupakan guru besar di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Pada bidang sastra, Buya Hamka banyak menyumbang karya-karyanya. Hamka termasuk sastrawan pada angkatan pujangga baru dan balai pustaka. Banyak sekali karya-karya Hamka dalam bidang kesusastraan. Buku-buku yang telah dihasilkan oleh Hamka tidak hanya mengenai agama, tetapi juga mengenai sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah dan kebudayaan. Karya-karya Hamka sampai saat ini masih melegenda. Bukunya-bukunya juga ada yang dijadikan buku teks sastra di Negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

“Sebagai ulama yang berkiprah saat berjuang, HAMKA tidak luput dari keterlibatannya dengan dunia politik. Tercatat ia pernah menjadi anggota Konstituante hasil pemilihan umum pertama tahun 1955 dari Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung, HAMKA menyampaikan pidato penolakan terhadap gagasan Bung Karno untuk menerapkan sistem Demokrasi terpimpin. (Artikel PK Sejahtera Jak-Sel).”

Tahun 1945, ketika Soekarno telah diangkat menjadi Presiden RI pertama, Presiden mengajak Hamka untuk pindah dari medan ke Jakarta. Namun karena terjadi agresi pertama, tahun 1947 permintaan Presiden tertunda. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Sumatera barat. Kembali Hamka bertemu Soekarno di Bukit tinggi. Pada kesempatan itu hamka menghadiakan sebuah puisi kepada Presiden pertama itu, dengan judul “Sansai juga aku kesudahannya”. Hamka dikenal sebagai ulama yang memegang teguh prinsip beragama. Sikap istiqomah sebagai makhluk Allah ini menempati kedudukan tertinggi di jiwanya, melebihi segala kedudukan di dunia. Hal ini tercermin dalam karir politik dan kepegawaian beliau.

Hamka menjadi salah seorang anggota dari Partai Sarekat Islam (PSI) dimana Hamka menjadi salah satu anggotanya. Karir politiknya berpuncak ketika bergabung menjadi juru kampanye Masyumi. Melalui pemilu 1955 yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Republik dan menjadi anggota Konstituante dari partai tersebut.

Seperti yang di ungkapkan Badruzzaman Busyairi, (37 : 2008) sebagai berikut :

“Sebagai anggota Konstituante, pada sidang bandung (1957) Hamka menyampaikan pidato menolak gagasan Presiden Soekarno yang ingin menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Dewan Konstituante kemudian dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959. Soekarno kemudian juga membubarkan Masyumi dengan menyatakannya sebagai partai terlarang pada 1960.”

Sebelum Masyumi dibubarkan, Hamka yang sejak 1950 berstatus sebagai pegawai negeri di Kementrian Agama, terlebih dahulu berhadapan dengan pemerintahan Soekarno yang melarang pegawai negeri golongan “F” merangkap sebagai anggota partai. Hamka memilih meletakkan jabatan sebagai pegawai negeri(yang pada waktu itu gajinya merupakan tulang punggung keluarga) dan melanjutkan karir politiknya di Masyumi. Sebelum mengundurkan diri, Hamka bertanya kepada istrinya, pilihan mana yang hendak diambil, tetap

menjadi PNS dan menikmati pendapatan yang pasti atau melanjutkan perjuangan untuk umat melalui parpol.

Djarnawi Kusuma, dalam ([https:// Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka](https://www.kemendikbud.go.id/dokumentasi/kenang-kenangan-70-tahun-buya-hamka)) mendeskripsikan :

Memanglah Hamka itu, sebagaimana dikatakan Djarnawi Hadikusuma, “mudah marah, lekas sedih, mudah berang, dan mudah memberi maaf”. Ia tak ingin Muhammadiyah, juga umat Islam, bertekuk lutut di bawah kekuasaan otoriter. Itu sebabnya, meski telah memohon maaf dan “memahami” sikap Kiai Farid dan sejawatnya yang sejalan, Hamka sebenarnya tidak benar-benar berhenti untuk mengkritik sikap “melenceng” para sahabatnya, meski dalam bahasa yang sopan dan tetap berada dalam koridor sejalan dengan jargon revolusinya Sukarno. Ulasan dengan kalimat-kalimat menyengat baru hadir ketika kekuasaan Sukarno tumbang; sebagai medan introspeksi bagi para sahabatnya yang silap dalam berjihad menghadapi kekuasaan Orde Lama. Menyengat tapi dalam kaidah adab seorang berilmu dan bermartabat; tanpa kata-kata merendahkan semisal *bangsat*, atau kesukaran meminta maaf. ([https:// Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka](https://www.kemendikbud.go.id/dokumentasi/kenang-kenangan-70-tahun-buya-hamka)). Di akses pada 05 Mei 2018.

Perseteruannya dengan Presiden Soekarno terus berlanjut. Pada agustus 1960, majalah “Panji Masyarakat” yang diterbitkannya sebagai corong dakwah islam dibreidel. Puncaknya pada 1964 Hamka ditangkap dengan tuduhan melanggar penetapan Presiden Anti Subversi.

Penulis mengkaji pola pemikiran Buya Hamka tidak terlepas dari sejarah latar belakang kehidupannya, sosio kultural, dan juga pendidikan karena pemikiran pada umumnya dilahirkan oleh suatu sistem sosial, penulis ingin mengkaji “Buya Hamka dan Perannya dalam dinamika perpolitikan Republik Indonesia pada masa pemerintahan orde lam 1945-1966”, dikarenakan kurangnya literatur yang membahas tentang perpolitikan Buya Hamka di Indonesia hingga Penulis mencoba meneliti tentang Dinamika Perpolitikannya. Oleh karena itu, studi tentang Buya Hamka dan Perannya dalam dunia perpolitikan Indonesia menjadi sangat menarik dan patut untuk diteliti secara mendalam dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi upaya memahami peranan Buya Hamka di Masa setelah Kemerdekaan Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah adalah terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: “terjadinya ketimpangan dinamika perpolitikan indonesia antara sistem politik orde baru dengan pemikiran politik

Buya Hamka pada masa orde baru tahun 1946-1966” dari masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah situasi perpolitikan masa orde lama?
2. Bagaimana karir Buya Hamka setelah kemerdekaan?
3. Bagaimana peran Buya Hamka dalam dinamika perpolitikan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di angkat judul dalam penelitian ini adalah :

“Buya Hamka Dan Peran nya Dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia pada Masa Pemeritahan Orde Lama1945-1966”.

C. BATASAN KONSEP DAN ISTILAH PENELITIAN

Batasan konsep dan istilah penelitian diperlukan agar pembaca dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Batasan penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian ini. Batasan konsep dalam ini peran Buya Hamka dalam dinamika perpolitikan pada masa Pemerintahan Orde Lama 1945-1966.

D. TUJUAN KAJIAN

Kajian penielitian ini, sesuai dengan permasalahan di atas, kemudian penulis menguraikan tentang tujuan kajian antara lain :

1. Untuk mendiskripsikan situasi biografi Buya Hamka.
2. Untuk mendiskripsikan situasi politik masa orde lama.
3. Untuk mendiskripsikan karir Buya Hamka setelah kemerdekaan.
4. Untuk mendeskripsikan peran Buya Hamka dalam dinamika perpolitikan.

E. KEGUNAAN KAJIAN

Setelah mengetahui arah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat kajian yang diharapkan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Digunakan untuk menambah wawasan dalam pembelajaran sejarah Indonesia dan sejarah pergerakan Indonesia khususnya bagaimana pergerakan perpolitikan di Indonesia masa pemerintahan oede lama tahun 1945-1966.

- b. Digunakan sebagai bahan informasi atau literatur mahasiswa sejarah dalam sejarah kontemporer terutama bagi penulis, serta memberikan pengetahuan dalam pemahaman perpolitikan Indonesia masa orde lama 1945-1966.

2. Secara praktis

- a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

F. METODE KAJIAN

1. Metode Historis

Dalam upaya penyelesaian suatu masalah dalam penelitian diperlukan suatu metode untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi peneliti. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan kajian kepustakaan. Menurut Louis Gottschalk yang dikutip Daliman (2012:28) metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

2. Teknik Pengumpulan Data (*Heuristik*)

Heuristik adalah kegiatan penelitian mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan. Heuristik berasal dari bahasa Yunani "*Heursken*" yang berarti menemukan. Seperti yang dikemukakan oleh Daliman (2012:52) menyatakan bahwa "heuristik adalah langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*) sejarah"

Berdasarkan konsep yang diutarakan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa heuristik merupakan kegiatan penelitian mengumpulkan sumber-sumber yang otentik dan sesuai dengan objek yang sedang diteliti.

Untuk langkah-langkah dalam mencari dan menemukan sumber data yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari sumber /data-data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca dan memahami buku atau artikel yang dijadikan sumber data dengan teliti dan cermat.
- c. Mengungkapkan kembali konsep-konsep yang didapat dari buku atau artikel sumber dengan bahasa penulis sesuai dengan pemahaman penulis.

Adapun sumber buku yang saya dapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 : Uji kesesuaian sumber data “Tinjauan Historis Peranan Buya Hamka Dalam dinamika perpolitikan republik indonesia pada masa pemerintahan orde lama Tahun 1945-1966”.

NO	Jenis Buku	Keterangan
1.	Buku : Ayah Kisah Buya Hamka	Asli
2.	Buku : Mengenang 100 Tahun Hamka	Asli
3.	Buku : Buya Hamka	Asli
4.	Buku : Pribadi dan Martabat Buya Hamka	Asli
5.	Buku : Buya Hamka Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme	Asli
6.	Buku : Mengintip Kisah Guru Besar Indonesia, Buya Hamka	Online

Dalam suatu penelitian sejarah yang lebih dominan terhadap sumber-sumber sejarah yang notabene berupa buku, maka salah satu metode yang paling tepat ialah dengan melakukan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa buku. “Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”, (Mestika Zed, 2004:3).

Dari pernyataan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian hendaknya harus ditunjang dengan sumber-sumber kepustakaan yang lengkap, dengan membaca buku-buku dan literatur lain yang relevan sehingga hasil penelitian akan lebih valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Untuk pelaksanaan studi kepustakaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan buku-buku atau artikel yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- b) Mengkaji dan memahami buku-buku atau artikel yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c) Mengklasifikasikan fakta hasil kajian dan penemuan berdasarkan konsep yang telah dibuat.
- d) Mengembangkan gagasan berdasarkan fakta yang telah diperoleh.

3. Keabsahan Pengumpulan Data (kritik sumber)

Suatu penelitian agar dapat mencapai hasil yang optimal maka harus didukung oleh data-data yang tepat. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran suatu data maka akan dilakukan dengan mengkritik sumber data, di dalam penelitian ini digunakan kritik ekstern dan intern, dari kedua jenis kritik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kritik Ekstern

Kritik eksternal adalah kritik yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu sumber. Seperti yang dikatakan oleh Nugroho Notosusanto (Sugeng Priyadi, 2012:64) sebagai berikut:

Masalah keotentikan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu:

- 1) Adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki?
- 2) Adakah sumber itu asli atau turunan (salinan)?
- 3) Adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah (bertambah atau berkurang)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kritik Ekstern berfungsi untuk membuktikan tentang kebenaran suatu data yang memang akan kita kehendaki, dan kritik ekstern dimaksudkan untuk mengetahui apa sumber data tersebut asli apa sudah tiruan, mungkin juga bentuknya masih utuh atau sudah berubah sehingga dari hal tersebut peneliti memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti berkaitan dengan kritik ekstern tersebut antara lain:

- 1. Mengumpulkan sumber(buku atau artikel) yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2. Melihat kecocokan antara sumber dengan judul penelitian.

3. Melihat kesamaan antara peristiwa yang terdapat di sumber dengan judul judul penelitian.

Untuk mengetahui keabsahan sumber data dikemukakan dalam tabel kritik ekstern sebagai berikut:

Tabel 2: Uji kebenaran sumber data Uji kesesuaian sumber data “Buya Hamka dan perannya dalam dinamika perpolitikan republik Indonesia pada masa pemerintahan orde lama Tahun 1945-1966”

No	Tema yang dibahas	Sumber data/Pengarah	Keterangan
1.	Kisah Buya Hamka	Irfan Hamka	Asli
2.	Anggota Konstituante	Badruzzaman Busyairi	Asli
3.	Perjalanan Hidup Sang Ulama	Yanuardi Syukur & Arlen Ara Guci	
4.	Pribadi dan Martabat	H. Rusyidi Hamka	Asli
5.	Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme	Akmal Sjafril	Asli
5.	Kisah Guru Besar Indonesia	Dwi Setia	Online

b. Kritik Intern

Dalam menguji keabsahan suatu sumber data yang diperoleh tidak cukup hanya menggunakan kritik ekstern, tapi diperlukan pengujian lain dengan menggunakan kritik intern untuk lebih menegaskan kebenaran suatu sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Seperti yang dikemukakan oleh Daliman (2012:73) “Kritik intern adalah uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen”. Dari pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa kritik intern dibutuhkan untuk memvalidasi kebenaran sumber data yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan kritik intern adalah mengevaluasi kebenaran fakta dan konsep sejarah yang ditulis dalam sumber.

Sedangkan untuk langkah-langkah pelaksanaan kritik intern adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kecocokan antara konsep dan fakta dalam sumber data dengan peristiwa yang kita teliti.

2. Menyesuaikan dengan urutan waktu kejadian yang ditulis dalam sumber dengan yang ditetapkan dalam penelitian.
3. Memahami tujuan penulis sumber data.

Berikut tabel untuk mengetahui kesesuaian antara sumber data yang digunakan dengan judul penelitian.

Tabel 3: Uji kesejatian isi sumber data “Buya Hamka dan perannya dalam dinamika perpolitikan republik Indonesia pada masa pemerintahan orde lama Tahun 1945-1966”.

No	Buku Sumber	Konsep yang dibahas	Halaman Buku Sumber	Keterangan
1.	Ayah Kisah Buya Hamka	Kisah Buya Hamka	318	Asli
2.	Mengenang 100 Tahun Hamka	Anggota Konstituante	37-123	Asli
3.	Buya Hamka	Perjalanan Hidup Sang Ulama	21-26	Asli
4.	Pribadi dan Martabat Buya Hamka	Pribadi dan Martabat	192	Asli
5.	Buya Hamka Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme	Kelurusan Akidah dan Pluralisme	27-28	Asli
6.	Mengintip Kisah Guru Besar Indonesia, Buya Hamka	Guru Besar Indonesia	-	Online

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya data-data tersebut dianalisis kebenarannya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi

Interpretasi adalah usaha untuk menafsirkan atau memaknai fakta-fakta yang ditemukan di sumber data yang telah kita kumpulkan dan kita pelajari. Seperti yang diungkapkan Daliman (2012:81) bahwa “interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*)”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pengertian yang dimaksud dengan interpretasi adalah tahap penafsiran yang berdasarkan fakta-fakta, langkah-langkah dan interpretasi data-data dapat diungkapkan seperti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberi penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan.
2. Memberi gambaran terhadap fakta - fakta yang ditemukan.
3. Menafsirkan temuan fakta yang didapatkan kedalam bahasa yang bermakna.

b. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan akhir dari penelitian yaitu penulisan sejarah. Menurut Nugroho Notosusanto (2006:36) "historiografi adalah merekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh".

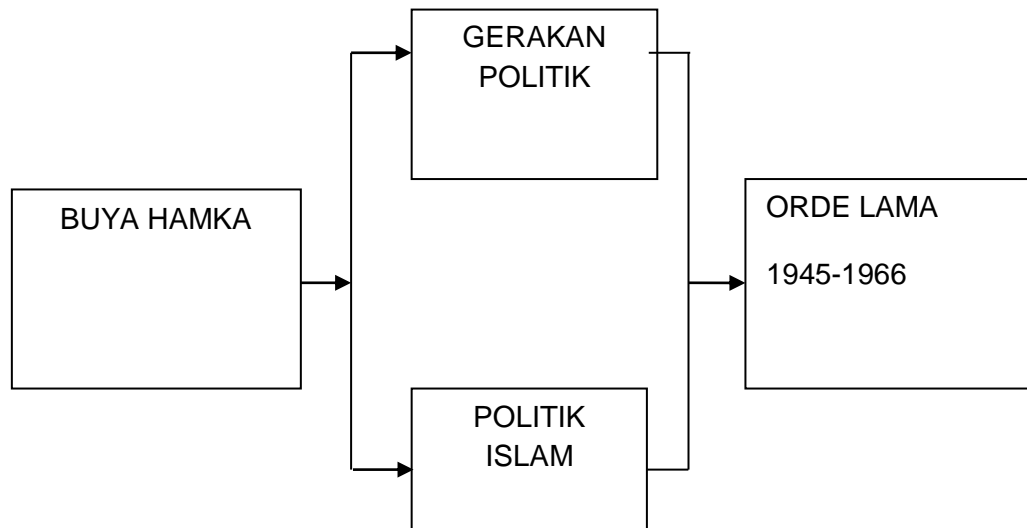
Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa historiografi adalah penulisan data-data atau fakta-fakta yang dibentuk sesuai kisah sejarah dalam kaitan diatas Nugroho Notosusanto (2006:141) menyatakan :

"Metode Historiografi adalah metode yang merupakan sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah secara kritik dan kemudian menyajikan sesuatu sintesa daripada hasil biasanya dalam bentuk tertulis."

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa metode sejarah merupakan suatu metode yang digunakan untuk membantu dalam usaha pengumpulan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan apa yang diteliti, sehingga peneliti dapat memberikan suatu sintesa dalam bentuk tulisan.

G. Batasan Konsep Dan Istilah

1 .KerangkaTeoritis dan Konseptual



Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir

Keterangan:

- X : Peranan Buya Hamka dalam perpolitikan orde lama
- X1 :Gerakan perpolitikan orde lama
- X2 : Peranan Buya Hamka terhadap gerakan politik Islam
- Y : Masa pemerintahan orde lama 1945-1966

2. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran secara tepat dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dudung Abdurrahman (dalam Basri MS, 2006:22) yaitu "Konsep dapat diartikan sebagai suatu abstraksi mengenai suatu gejala atau realitas". Dalam penelitian yang bersifat historis batasan konsep dalam sejarah dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Konsep Politik

Pengertian politik secara harfiah, yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Hal ini sesuai penjelasan Kartini Kartolo (dalam pengertian-politik-menurut-para-ahli.html).

Politik ialah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah dan berlaku ditengah masyarakat. (<https://pengertian-politik-menurut-para-ahli.html>). Di akses pada 05 Mei 2018.

Menurut Joice Mitchel, 2009:

“Pengertian Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya”.

Menurut Prof. Miriam Budhiarjo, 2010:

“Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan”.

Menurut Johan Kaspar Bulunchi, 2010:

“Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Menurutnya, politik juga membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)”.

Sedangkan menurut Hamid, 2011:

“Politik di masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan pula organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana “pemerintah” adalah otoritas yang teroganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif”.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu strategi untuk melaksanakan suatu program dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan pemikiran pelaku politik.

Pada tahun 1955, Hamka memang tercatat sebagai anggota konstituante Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan berpidato dalam Pemilu Raya di tahun yang sama.

Meskipun pada akhirnya, partai yang didirikan di Yogyakarta pada 7 November 1945 itu dibubarkan Presiden Soekarno di awal tahun 1960. Pada dekade 1950-an, politik seakan menjadi “panglima”, menyikapi kenyataan tersebut, Hamka pernah menyampaikan pernyataannya yang

melukiskan martabat sebagai pemimpin umat, "Kursi-kursi banyak, dan orang yang ingin pun banyak.

Menjelang tumbangnya rezim Orde Lama, persisnya tahun 1964, Hamka pernah mendekam di penjara selama dua tahun karena dituduh pro-Malaysia. Meski secara fisik ia terkurung, Hamka terus berkarya. Jika kebanyakan orang usai menjalani hukuman sebagai tahanan politik lebih memilih untuk mengeluarkan buku kecaman terhadap rezim penguasa, tak demikian halnya dengan Hamka. Ia justru menghasilkan mahakarya yang membuat namanya tersohor hingga ke mancanegara, yakni tafsir Al Quran yang diberi nama Tafsir Al-Azhar, sesuai dengan nama masjid tempat Hamka selalu memberikan kuliah subuh. Tafsir Al-Azhar yang berisi terjemahan Al-Quran sebanyak 30 juz lengkap itu merupakan satu-satunya Tafsir Al Qur'an yang ditulis oleh ulama melayu dengan gaya bahasa yang khas dan mudah dicerna. Diantara ratusan judul buku mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah dan kebudayaan yang melegenda hingga hari ini, bisa dibilang Tafsir Al-Azhar adalah karya Hamka yang paling fenomenal. Seperti yang di ungkapkan Irfan Hamka, (318 : 2013) sebagai berikut :

"Hamka dikenal dengan karya-karyanya yang menggugah diantaranya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Dibawah Lindungan Ka'bah dan Tafsir Al-Azhar adalah sederetan karya monumental. Karya itu identik berkisah percintaan yang mendayu-dayu. Kecuali buku serius mirip tafsir al-azhar yang beliau tulis dalam terali besi pada era orde lama. Beliau memiliki hubungan dekat dengan Soekarno. Hubungan Hamka dan Soekarno dimulai sejak tahun 1941, sebelum merdeka dan sebelum Soekarno menjadi Presiden RI pertama. Perjumpaan pertama Buya Hamka dan Soekarno atas Prakaasa H. Abdul Karim Oey tahun 1941 ketika Soekarno diasingkan di Bengkulu".

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Hamka adalah seorang tokoh besar yang dikenal dalam dinamika perpolitikan masa orde lama peran serta dalam gerakan politik dan karya tulisannya menunjukkan beliau seorang guru besar sekaligus politikus yang ulung, perannya sudah tidak diragukan lagi dalam diplomasi perpolitikan Indonesia masa orde lama.

b. Konsep Politik Islam

Dinamika politik selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi kalangan masyarakat yang negaranya menggunakan sistem demokrasi karena mereka mengetahui manuver pelaku politik yang memegang kekuasaan dalam

mengambil kebijakan, terkadang timbul pro dan kontra sehingga demonstrasi terjadi diberbagai tempat untuk mendukung pemerintah atau menolak kebijakan tersebut.

Agama Islam telah mengatur masalah politik yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, oleh karena itu bagi umat Islam ruang untuk memproduksi hukum harus tetap berpegangan dengan dasar-dasar fundamental seperti musyawarah, keadilan, dan sifat egaliter. Dan masalah dasar-dasar tersebut tidak ada kesepakatan diantara para ulama syariah tetapi perbedaan hanya masalah apakah dasar-dasar itu ada korelasi dengan produk hukum yang akan dikeluarkan.

Menurut istilah 'fuqahā' (ulama fikih)

"Politik islam adalah membina (membangun atau mendasari) hukum sesuai dengan tuntutan maslahat (kepentingan) umat yang tidak terdapat dalil khusus dan rinci mengenainya".

Menurut Ibnu Al-Qayyim

"Politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula".

Menurut Ulama Fikih

"Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok".

Dalam masalah dasar-dasar fundamental para ulama berbeda pendapat, pertama, sebagian ulama ahli syariah mengatakan yaitu keadilan, musyawarah, dan sifat egaliter, kemudian yang kedua sebagian ulama syariah yang lain yaitu keadilan, musyawarah, dan taat kepada para ulil amri meskipun mereka disenangi atau dibenci kecuali apabila mereka memerintahkan maksiat maka jangan ditaati dan didengarkan.

Dan dasar-dasar itu apabila diimplementasikan dalam bernegara untuk memproduksi hukum yang berlaku bagi masyarakat pada masa sekarang masih menemukan relevansinya, sehingga secara implisit dasar-dasar itu telah dipraktekkan oleh banyak negara yang menganut demokrasi.

c. Politik Buya Hamka

Hamka pernah menekuni bidang jurnalistik dengan berkarir sebagai wartawan, penulis, editor dan penerbit sejak awal tahun 1920an. Ia tercatat pernah menjadi wartawan berbagai surat kabar, yakni Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Di sela kegiatannya sebagai jurnalis, Hamka memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Sarekat Islam pada tahun 1925.

Di waktu yang hampir bersamaan, ia ikut mendirikan Muhammadiyah untuk menentang khurafat, bidaah dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Selanjutnya Hamka terlibat dalam kepengurusan organisasi Islam tersebut dari tahun 1928 hingga 1953. Bersama dengan KH Fakhri Usman (Menteri agama dalam Kabinet Wilopo 1952), Hamka menerbitkan majalah tengah bulanan Panji Masyarakat pada Juli 1959. Majalah ini menitikberatkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibredel pada 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat karangan Dr Muhammad Hatta berjudul 'Demokrasi Kita', yang isinya mengkritik tajam konsep Demokrasi Terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali setelah Orde Lama tumbang, tepatnya pada 1967. Hamka sendiri dipercaya sebagai pimpinan umum majalah Panji Masyarakat hingga akhir hayatnya.

Abdushshabur Rasyid Ridha , dalam (sumber: tokohindonesia.com)

"Hamka juga pernah menjadi editor di majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam. Pada tahun 1928 hingga 1932, Hamka pernah menjadi editor sekaligus penerbit dari dua media yang berbeda, yakni majalah Kemajuan Masyarakat yang terbit hanya beberapa nomor serta majalah al-Mahdi di Makassar. Di sela kegiatannya sebagai jurnalis, Hamka memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Sarekat Islam pada tahun 1925. ([https:// sumber: tokohindonesia.com](https://sumber:tokohindonesia.com)). Di akses pada 08 Mei 2018".

Di waktu yang hampir bersamaan, ia ikut mendirikan Muhammadiyah untuk menentang khurafat, bidaah dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Selanjutnya Hamka terlibat dalam kepengurusan organisasi Islam tersebut dari tahun 1928 hingga 1953. Mulai tahun 1928, ia mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Setahun kemudian, ia mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada 1931, ia menjabat sebagai konsul Muhammadiyah di Makassar.

Lima tahun berselang, usai menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah, Hamka pindah ke Medan. Kemudian di tahun 1945, ia kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Saat itulah, bakatnya sebagai pengarang mulai tumbuh. Buku pertama yang dikarangnya berjudul *Khathibul Ummah*, yang kemudian disusul dengan sederet judul lain yakni *Revolusi Fikiran*, *Revolusi Agama*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Negara Islam*, *Sesudah Naskah Renville*, *Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman*, *Dari Lembah Cita-Cita*, *Merdeka*, *Islam dan Demokrasi*, *Dilamun Ombak Masyarakat*, dan *Menunggu Beduk Berbunyi*.

Saat perang revolusi, Hamka juga turut berjuang mengusir penjajah. Lewat pidato, ia mengobarkan semangat para pejuang untuk merebut kedaulatan negara. Dalam kisah perjuangannya, Hamka juga pernah ikut serta menentang kembalinya Belanda ke Indonesia dengan bergerilya di dalam hutan di Medan. Selain didorong rasa cinta pada Tanah Air yang demikian besar, semangat perjuangan Hamka juga senantiasa berkobar tiap kali mengingat pesan ayahnya yang diucapkan ketika Mukhtar Muhammadiyah tahun 1930 di Bukittinggi, "Ulama harus tampil ke muka masyarakat, memimpinya menuju kebenaran."

Pasca kemerdekaan, Konferensi Muhammadiyah memilih Hamka untuk menduduki posisi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto di tahun 1946. Lalu pada 1947, ia menjabat sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional yang beranggotakan Chatib Sulaeman, Udin, Rangkayo Rasuna Said dan Karim Halim. Hamka juga mendapat amanat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjabat sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional.

Pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1951-1960, Hamka mendapat mandat dari Menteri Agama Indonesia untuk duduk sebagai Pejabat Tinggi Agama. Namun belakangan, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri sebab pada waktu itu Presiden Soekarno memintanya memilih antara menjadi pegawai negeri atau berkiprah di dunia politik.

d. Dinamika Politik Orde Lama

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan perpolitikan orde lama pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1. Sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka pengaruh dari lingkungannya, disamping juga dapat mengubah lingkungannya. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

3. Batasan Istilah

Orde Lama adalah sebuah istilah yang ditujukan pada Negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno dalam pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1968. Orde lama juga sebagai sistem yang mewakili kepemimpinan Presiden Soeharto hingga terjadinya reformasi dimulai pada 1998, hal ini juga sebutan yang berasal dari kata Latin “urutan”. Dengan konsep ketertiban yang dapat diartikan sebagai bagian / anggota yang mengandung dalam parlemen yang diatur oleh prinsip-prinsip tertentu

Dari batasan konsep dan landasan teori di atas, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Tinjauan historis merupakan usaha untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang segala sesuatu yang telah terjadi melalui penelusuran bukti-bukti.
- b. Untuk mengetahui kondisi politik pada masa orde lama

Tahun 1945, ketika Soekarno telah diangkat menjadi Presiden RI pertama, Presiden mengajak Hamka untuk pindah dari medan ke Jakarta. Namun karena terjadi agresi pertama, tahun 1947 permintaan Presiden

tertunda. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Sumatera barat. Kembali Hamka bertemu Soekarno di Bukit tinggi. Pada kesempatan itu Hamka menghadiakan sebuah puisi kepada Presiden pertama itu, dengan judul "Sansai juga aku kesudahannya". Hamka dikenal sebagai ulama yang memegang teguh prinsip beragama. Sikap istiqomah sebagai makhluk Allah ini menempati kedudukan tertinggi di jiwanya, melebihi segala kedudukan di dunia. Hal ini tercermin dalam karir politik dan kepegawaian beliau.

Hamka menjadi salah seorang anggota dari Partai Sarekat Islam (PSI) dimana Hamka menjadi salah satu anggotanya. Karir politiknya berpuncak ketika bergabung menjadi juru kampanye Masyumi. Melalui pemilu 1955 yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Republik dan menjadi anggota Konstituante dari partai tersebut. .

c. Peranan Buya Hamka

Pasca kemerdekaan, Konferensi Muhammadiyah memilih Hamka untuk menduduki posisi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto di tahun 1946. Lalu pada 1947, ia menjabat sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional yang beranggotakan Chatib Sulaeman, Udin, Rangkayo Rasuna Said dan Karim Halim. Hamka juga mendapat amanat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjabat sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional.

Pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1951-1960, Hamka mendapat mandat dari Menteri Agama Indonesia untuk duduk sebagai Pejabat Tinggi Agama. Namun belakangan, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri sebab pada waktu itu Presiden Soekarno memintanya memilih antara menjadi pegawai negeri atau berkiprah di dunia politik.

4. Kajian yang Relevan

Dalam penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep pembahasan yang akan dikaji dengan literatur yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak, artikel jurnal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan

terpercaya dalam sebuah hasil penulisan sejarah. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Salman Al-Farisi yang berjudul *Eksistensi Pemikiran Politik Ekonomi Buya Hamka*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kebijakan new liberal di tandai dengan masuknya secara bebas modal asing kedalam seluruh sektor ekonomi. Bahkan sektor yang seharusnya beruang di genggaman pemerintah dimasuki. Dalam tulisan ini Al-Farisi memfokuskan bagaimana sikap hidup kita bagaimana wajah bangsa serta masyarakat pancasila yang sosialis dan religius. Tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme dan imperialisme.
2. Skripsi Ferhan Effendi yang berjudul *Buya Hamka Dan Strategi Perjuangannya*; Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Konsep perjuangan yang di pakai *Buya Hamka* sepenuhnya berangkat dari paham filsafat marxisme dan pokok-pokok pemikirannya yang bisa diruntut dari system filsafat yang mendasar dan komprehensif dalam sebuah traktat filsafat marxis yang berjudul *Madilog*. Oleh *Buya Hamka* *Madilog* ini dikatakan sebagai cara berfikir yang berlandaskan materialisme, dialektika dan logika untuk mencari bukti di dalam kenyataan alamiah secara rasional dan ilmiah, sekaligus berambisi membangun dan memadu perubahan rakyat negrinya. Walhasil *Buya Hamka* menginginkan membangun filsafat kaum proletar Indonesia.
3. Artikel Skripsi Ardi Arfian yang berjudul *Pandangan Politik Buya Hamka Tentang Konsep Negara Republik*; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri Penulis menemukan dalam penelitian ini, *Buya Hamka* sebagai anggota PKI juga sebagai anggota komintern, sekaligus seorang yang dibuang oleh penguasa yang berkuasa di daerah yang ditinggalinya. Banyaknya permasalahan yang belum terungkap berkaitan dengan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia yang berkaitan dengan pemikiran Tan Malaka mengenai pandangan politik konsep Negara Republik.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian ini adalah Historis/ Tinjauan Pustaka.
2. Objek penelitian :
 - a) Peran Buya Hamka dalam dinamika perpolitikan
 - b) Indonesia pada masa pemerintahan orde lama
3. Subjek penelitian ini adalah buku-buku atau pustaka yang ditulis oleh para ahli, yang berkaitan dengan Peran Buya Hamka dalam dinamika perpolitikan tahun 1945-1966.
4. Lokasi penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.
5. Waktu Penelitian ini adalah tahun 2021.